

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, salah satu bentuk implementasi dari sistem pemerintahan demokrasi ialah melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu dijadikan sebagai gerbang perubahan untuk melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik melalui produk-produk hukum seperti kebijakan (Amrizal, dkk, 2018: 14). Pemilu tahun 2019 merupakan pemilu serentak pertama di Indonesia, di mana selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, warga negara Indonesia juga dapat memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Fenomena pemilu serentak tahun 2019 membuat warga negara Indonesia, khususnya pemilih pemula merasa kesulitan memilih karena banyaknya kategori suara yang harus dipilih.

Pelaksanaan pemilu dapat berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam hal ini, keterlibatan aktif dari warga negara dalam seluruh tahapan pemilu sangatlah dibutuhkan. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, karena salah satu tolak ukur dari keberhasilan suatu pemilu dilihat dari tingkat partisipasi politik pada pelaksanaan pemilu.

Banyak warga negara Indonesia khususnya pemilih pemula yang cenderung tidak tertarik dengan urusan politik negara, misalnya pada saat pelaksanaan pemilu. Banyak negara dengan sistem pemerintahan demokrasi di dunia yang menghasilkan angka partisipasi orang yang lebih tua lebih konsisten dan jumlahnya lebih besar, dibandingkan dengan mereka yang lebih muda (Tozer, 2016). Hal tersebut salah satunya dikarenakan pemilih pemula kurang memahami dan belum memiliki kesadaran politik betapa pentingnya hak suara mereka, sehingga seringkali ditemukannya angka Golongan Putih (golput) di setiap pelaksanaan pemilihan umum.

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi suara yang sangatlah penting dalam pelaksanaan pemilu. Sebanyak 20 % dari seluruh pemilih adalah pemilih pemula. Jumlah dari pemilih pemula sangatlah besar, sehingga diharapkan mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Sifat apatisme seringkali ditemukan pada pemilih pemula. Sodikin menjelaskan bahwa Indonesia mencatat jumlah golput didominasi oleh pemilih pemula, dan terus meningkat di setiap pelaksanaan pemilu, yaitu 10,21 % pada pemilu 1999, kemudian meningkat menjadi 23,34 % pada pemilu 2004, dan terus meningkat menjadi 39,10 % pada pemilu 2009 (Perangin-angin, dkk, 2018: 737).

Sikap ketidakpedulian terhadap partisipasi politik yang cenderung ada pada pemilih pemula disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran politik pemilih pemula akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, hal ini menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan urusan politik negara. Kesadaran akan hak dan kewajiban dapat dimiliki jika pemilih pemula mempunyai literasi politik yang baik. Studi yang dilakukan oleh negara demokrasi barat, secara konsisten menemukan bukti yang signifikan terkait hubungan positif antara pendidikan dan partisipasi pemilih, menyatakan bahwa pemilih yang tingkat pendidikannya lebih tinggi menunjukkan kemungkinan yang lebih besar untuk memilih dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah (Snelling, 2016: 4)

Faktor lainnya ialah sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah. Pemilih pemula cenderung memiliki tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap sistem pemerintahan yang ada. Hal ini disebabkan dari adanya kecurangan-kecurangan seperti korupsi yang selalu menjadi berita utama, yang kemudian membuat pemilih pemula melihat politik hanya dari sisi negatifnya saja, serta pemilih pemula merasa kurang terwakili oleh politik dalam merealisasikan aspirasi-aspirasi mereka (Lestari, 2021). Pemilih pemula juga cenderung tidak tertarik dengan kegiatan politik juga disebabkan karena pemilihan umum yang sifatnya konvensional.

Menanggapi permasalahan tersebut, ada beberapa strategi dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dalam artikel yang berjudul *“Increasing Electoral Turnout Among the*

Young: Compulsory Voting or Financial Incentives?” menawarkan beberapa strategi yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan metode pemungutan suara wajib, di mana pemilih pemula sebagai warga negara diwajibkan untuk memilih dan jika tidak melakukannya maka mereka akan mendapatkan hukuman, misalnya seperti hukuman dalam bentuk denda. Terdapat juga strategi lainnya yaitu dengan melakukan metode yang mendorong pemilih pemula untuk memilih melalui insentif keuangan. Jika pemilih pemula menghadiri kegiatan sosialisasi, ambil bagian dalam kegiatan diskusi dan kemudian memberikan hak suara mereka, maka pemilih pemula akan dibayar dari kegiatan-kegiatan politik yang mereka lakukan (Tozer, 2016: 19). Strategi-strategi tersebut dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi rendahnya jumlah partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Kota Bekasi merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2019. Jika dibandingkan dengan pemilu Presiden (pilpres) tahun 2014, terjadi peningkatan angka partisipasi pada pilpres 2019. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU kota Bekasi, pada pemilu 2019 sebanyak 1.682.120 pemilih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan rincian 836.862 pemilih laki-laki dan 845.258 pemilih perempuan. Pemilu serentak 2019 di kota Bekasi mengalami kenaikan partisipasi pemilih sebesar 76,1% untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Angka ini meningkat jauh dibandingkan dengan pemilu 2014 yang hanya sekitar 66 % untuk pilpres (Pulungan, dkk, 2020: 252).

Menurut Pahrevi (2019) terdapat 34.483 pemilih pemula yang tercatat di kota Bekasi pada pemilihan umum 2019 (Kompas.com). Jumlah pemilih pemula sama dengan 2,05 persen dari DPT di kota Bekasi yang berjumlah sebanyak 1.682.120 orang. Jumlah pemilih pemula pada pilpres 2019 di kota Bekasi lebih besar dibandingkan dengan jumlah pemilih pemula pada pilpres 2014 yaitu sebesar 29.802 pemilih. Pemilih pemula yang jumlahnya cukup banyak ini diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan menghindari perbuatan golput, sehingga dapat membantu mengurangi angka golput yang cenderung naik di setiap pelaksanaannya.

Kota Bekasi menjadi salah satu daerah di provinsi Jawa Barat yang berhasil meningkatkan angka partisipasi pemilih. Angka partisipasi pilpres tahun 2019 menjadi jumlah partisipasi paling baik di kota Bekasi. Menurut Niman (2019), Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Bekasi Divisi Data, Pedro Purnama Kalangi mengatakan ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab meningkatnya jumlah partisipasi pemilih di kota Bekasi, salah satunya adalah kesadaran warga kota Bekasi terkait hasil pemilu terhadap arah kemajuan bangsa dalam lima tahun ke depan (Niman, 2019). Berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU kota Bekasi kepada masyarakat setempat juga merupakan salah satu faktor meningkatnya jumlah partisipasi pemilih di kota Bekasi.

Dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam proses pemilu dibutuhkan peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi berupa pendidikan politik. Kegiatan sosialisasi dalam bentuk pendidikan politik tersebut merupakan strategi KPU kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilu tahun 2019. Dalam hal ini KPU memberikan pemahaman tentang pemilu, baik secara teori maupun teknik pelaksanaannya kepada masyarakat setempat. Sejumlah agenda kegiatan yang dilakukan KPU kota Bekasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 di kota Bekasi, antara lain: (1) Melakukan kegiatan Pagelaran Seni Budaya menyongsong satu tahun pemilu serentak Tahun 2019; (2) KPU *Goes To School*; (3) Kegiatan Kursus Kepemiluan; (4) Kegiatan Konser Musik “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”; (5) Kegiatan Pemilu *Run*; dan (6) Lomba kreasi pentas seni pemilih pemula (Lomba Marawis) pemilu serentak Tahun 2019 (Pulungan, dkk, 2020: 259).

KPU kota Bekasi tidak hanya melakukan sosialisasi tatap muka saja, melainkan juga dalam bentuk digital. Sosialisasi dalam bentuk tatap muka, KPU kota Bekasi melakukan pemetaan segmentasi pemilih yang kemudian akan dibentuk sebagai relawan demokrasi agar sosialisasi yang dilakukan dapat lebih diterima oleh setiap elemen masyarakat. Dalam bentuk digitalnya, KPU kota Bekasi memanfaatkan media sosial, seperti *Twitter*, *Instagram*, *Facebook*, dan *Website* (Pulungan, dkk, 2020: 260). Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yaitu era di mana teknologi digital semakin masif. Dalam hal ini KPU memiliki

peluang positif dalam memberikan pendidikan politik berupa informasi yang *update* dan terpercaya melalui media sosial, yang mana sebagian besar penggunaannya ialah generasi muda (pemilih pemula).

Dalam proses pesta demokrasi terdapat masyarakat yang antusias terlibat di dalamnya dan ada juga masyarakat yang apatis pada saat pelaksanaan pemilu berlangsung, khususnya pemilih pemula yang belum begitu paham terkait kegiatan politik. Seringkali ditemukannya fenomena-fenomena rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Indonesia. Masih banyak warga negara Indonesia khususnya pemilih pemula yang belum paham bagaimana menggunakan hak pilihnya dengan baik, sehingga banyak dari mereka yang menggunakan hak pilihnya dengan seenak-enaknya atau bahkan memilih untuk golput.

Pemerintah merespon hal tersebut dengan mengeluarkan berbagai peraturan seperti yang termuat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adanya peraturan-peraturan tersebut diharapkan pemilih pemula menjadi lebih paham bagaimana menggunakan hak pilihnya dengan baik dan dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga dapat terhindar dari sikap politik golput yang sudah ada sejak era reformasi.

KPU kota Bekasi sebagai penyelenggara pemilu telah menjalankan perannya dengan melakukan sejumlah agenda kegiatan sosialisasi yang berbentuk literasi politik kepada pemilih pemula. KPU kota Bekasi telah menjalankan perannya namun angka golput masih saja ditemukan dan terdapat kemungkinan bahwa beberapa dari pemilih pemula menggunakan hak pilihnya secara seenak-enaknya. Jika KPU kota Bekasi telah menjalankan perannya dengan masif dan optimal, seharusnya angka golput sudah tidak ditemukan lagi serta pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik karena telah mendapatkan sejumlah pengetahuan dan informasi dari KPU kota Bekasi melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi yang telah diberikan. Peran KPU kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula menjadi sangat strategis, kinerja KPU kota Bekasi sangat menentukan proses pengambilan keputusan para pemilih pemula. Jika

kinerja KPU kota Bekasi buruk akan berdampak pada proses pengambilan keputusan bagi pemilih pemula.

Dari permasalahan diatas, terdapat penelitian terdahulu mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU), **Penelitian Pertama** telah dilakukan oleh Nugroho & Sukmariningsih berjudul Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis. Nugroho & Sukmariningsih (2020) meneliti tentang peranan KPU di kabupaten Pati yang mana tingkat pendidikannya masih tergolong rendah dan hal itu dapat menghambat proses sosialisasi oleh KPU kepada masyarakat (Nugroho & Sukmariningsih, 2020: 22) Perbedaan penelitian Nugroho & Sukmariningsih dengan penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada peran KPU, di mana dalam penelitian Nugroho & Sukmariningsih tidak hanya berfokus pada peran dalam memberikan pendidikan politik saja, namun peran KPU secara keseluruhan. Penelitian ini memiliki kekurangan di mana pembahasannya kurang mendalam karena cakupan pembahasan yang terlalu luas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan disini akan memfokuskan pada satu peran saja dengan membahas secara mendalam terkait peran KPU dalam literasi politik pemilih pemula.

Penelitian Kedua telah dilakukan oleh Noor, Hairunnisa & Gufron, yang menggambarkan tentang bagaimana langkah Komisi Pemilihan Umum kota Samarinda dalam melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran memilih pemimpin pusat dan daerah untuk lima tahun ke depan. Penelitian ini juga membahas tentang bagaimana komunikasi partisipasi politik masyarakat kota Samarinda dalam mengikuti dan memeriahkan pemilu 2019. Peran yang dilaksanakan KPU kota Samarinda berupa melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, baik secara langsung, tatap muka maupun melalui media sehingga komunikasi partisipasi politik masyarakat dapat meningkat. Model komunikasi yang digunakan oleh KPU kota Samarinda adalah model SCMR dari Berlo, yaitu *Source* (sumber/komunikator), *Message* (pesan), *Channel* (media/saluran/alat), dan *Receiver* (penerima/komunikan) (Noor, dkk, 2019). Perbedaan penelitian Noor, dkk terletak pada langkah KPU kota Samarinda dalam mengedukasi masyarakat setempat yang difokuskan pada komunikasi partisipasi politiknya. Penelitian Noor lebih dalam terkait dengan komunikasi

antara KPU kota Samarinda selaku sumber informasi dan masyarakat setempat selaku penerima informasi, agar pada pelaksanaan sosialisasi dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi (Noor, dkk, 2019: 127).

Penelitian Ketiga, Bahari membahas tentang Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Batubara. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaturan hukum KPU dan bagaimana peranan KPU dalam menyelenggarakan pemilu di daerah. Untuk menunjang upaya KPU kabupaten Batubara dalam penyelenggaraan pemilihan umum, maka anggota KPU kabupaten perlu didukung dengan pengalaman kerja. Pengalaman kerja yang banyak akan mendorong pada peningkatan produktifitas anggota KPU dalam merealisasikan pelaksanaan pemilu (Bahari, dkk, 2020: 8). Penelitian Bahari lebih menganalisis pengaturan hukum tentang KPU yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Penelitian Keempat berkenaan dengan Literasi Politik, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri bahwa literasi politik merupakan senyawa dari pengetahuan, keterampilan dan sikap mengenai politik termasuk mengenai pemilu. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat hubungan antara tingkat melek politik dengan partisipasi pemilih di kabupaten Solok. Tingkat melek politik dengan partisipasi pemilih di kabupaten Solok berhubungan secara positif dan signifikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat melek politik masyarakat yaitu (1) Kebutuhan terhadap informasi politik; (2) Strategi pencarian; (3) Gerakan mengkomunikasikan informasi; dan (4) Mengevaluasi produk dari proses akhir politik (Putri, 2017: 51). Penelitian Putri membahas lebih mendalam mengenai dampak literasi politik terhadap partisipasi pemilih dalam pemilu. Dalam penelitian ini menawarkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat melek politik masyarakat, dan juga menawarkan kebijakan apa yang perlu dirumuskan untuk meningkatkan melek politik warga kabupaten Solok.

Penelitian Kelima, dilakukan oleh Ridha & Riwanda yang mengkaji tentang pengaruh literasi media dan literasi politik terhadap partisipasi kewarganegaraan pemilih pemula di era digital. Pemilih pemula yang memiliki literasi politik yang baik dinilai akan mampu berpartisipasi dengan aktif dan juga

efektif dalam pesta demokrasi. Penelitian ini menghasilkan bahwa literasi media dan literasi politik mempengaruhi partisipasi kewarganegaraan warga negara baik secara parsial maupun simultan. Tingkat literasi media pemilih tidak menjadi pemicu lemah atau kuatnya hubungan literasi politik dengan partisipasi kewarganegaraan yang dimiliki pemilih (Ridha, dkk, 2020: 110). Penelitian Ridha, memfokuskan pada bagaimana media memberikan pengaruh pada literasi politik dan menunjukkan faktor yang memberikan pengaruh terhadap tingkat partisipasi.

Penelitian Keenam, Efendi membahas tentang pendidikan politik yang harus diselingi dengan kesadaran bersama sehingga dalam mengambil keputusan yang dapat di pertanggung jawabkan dengan kata lain, tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja. Dalam penelitian ini terbukti adanya bahwa terdapat hubungan antara pendidikan politik dan partisipasi politik. Pendidikan politik warga kecamatan Waru masih minim sekali karena jarang diberikan oleh lembaga-lembaga tertentu sehingga menimbulkan partisipasi yang sekedar ikut-ikutan serta pengaruh dari luar, tanpa ada kesadaran dari masing-masing individu. Rendahnya pendidikan politik masyarakat kecamatan Waru mempengaruhi rendahnya partisipasi politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2015 (Efendi, 2019: 79).

Penelitian Ketujuh berkenaan dengan Partisipasi Pemilih Pemula, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Liandini mengenai partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan presiden di desa harapan tahun 2019. Pengetahuan pemilih pemula terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya, hanya saja yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi. Dalam penelitian ini sebagian besar pemilih pemula menggunakan hak suaranya pada pemilihan presiden di desa harapan tahun 2019 yang didorong oleh beberapa faktor, ialah pengaruh politik media massa, jejaring sosial, dan diskusi-diskusi politik informal, seperti diskusi bersama teman sebaya (Liandini, 2020: 76) Penelitian Liandini lebih membahas pada bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh pemilih pemula di desa harapan, serta membahas mengenai faktor pendorong dan juga faktor penghambat yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula di desa harapan.

Penelitian Kedelapan dilakukan oleh Hidayat yang membahas tentang Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu tahun 2019. Partisipasi politik

pemilih pemula pada pemilu tahun 2019 mengalami peningkatan, selain menyalurkan hak pilihnya, pemilih pemula juga berpartisipasi dalam kegiatan kampanye, panitia pengawas pemilu, dan demonstrasi. Berdasarkan keaktifan pemilih pemula tersebut, maka dapat dikategorikan ke dalam jenis partisipasi politik spectator, partisipasi politik gladiator, dan partisipasi politik pengkritik (Hidayat, 2021: 52). Penelitian Hidayat lebih membahas pada bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh pemilih pemula di desa Lubuk Lancang yang kemudian dikategorikan dalam jenis partisipasi politik.

Penelitian Kesembilan yang dilakukan oleh Perangin-angin & Zainal mengidentifikasi jaringan sosial para pemilih pemula di dalam media sosial serta pengaruhnya pada partisipasi politik. Hasil penelitian menunjukkan media sosial telah digunakan secara masif oleh pemilih pemula, media sosial dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa harus memerlukan persiapan fisik apapun itu. Pemilih pemula lebih tertarik dengan situs media sosial daripada media konvensional, salah satu kegiatan yang membantu para pemilih pemula dalam mengambil keputusan politik adalah diskusi tentang politik dengan orang terdekat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Perangin-angin menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih pemula berpartisipasi secara maksimal melalui media sosial, sedangkan partisipasi secara offline masih belum maksimal (Perangin-angin, dkk, 2018: 737). Penelitian Perangin-angin & Zainal lebih memfokuskan pada partisipasi politik pemilih pemula di media sosial, sedangkan penelitian ini membahas partisipasi politik pemilih pemula secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Literasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Presiden Tahun 2019 di kota Bekasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Jumlah pemilih pemula pada pemilu Presiden 2019 di kota Bekasi lebih besar dibandingkan pada pemilu Presiden 2014. Angka pemilih pemula di kota Bekasi berjumlah 34.483 orang, diharapkan mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik mungkin. KPU kota Bekasi selaku penyelenggara pemilu 2019 harus menjalankan perannya dengan masif dan optimal dalam memberikan literasi politik kepada pemilih pemula melalui sejumlah kegiatan sosialisasi. Hal ini

dikarenakan salah satu indikator sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilu bergantung pada kinerja dari KPU dalam mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat.

KPU kota Bekasi dapat dikatakan telah menjalankan perannya dengan cukup baik, dilihat dari sejumlah kegiatan sosialisasi yang diberikan kepada pemilih pemula, yaitu dengan memanfaatkan media sosial dan kegiatan-kegiatan menarik lainnya agar pemilih pemula tertarik untuk memberikan kontribusinya pada penyelenggaraan pemilu 2019. Terdapat beberapa kendala atau faktor-faktor penyebab mengapa masih ditemukannya angka golput pada pemilu 2019, salah satunya karena hari pelaksanaan pemilu 2019 berdekatan dengan hari pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA atau SMK. Kendala-kendala tersebut dapat menyebabkan pemilih pemula memutuskan untuk golput karena konsentrasi mereka yang terpecah. Faktor penyebab lainnya yaitu tidak adanya kesadaran politik dalam diri seseorang sehingga mereka memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Bekasi dalam literasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Presiden Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Bekasi dalam literasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Presiden Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibagi ke dalam dua sifat, yaitu manfaat penelitian yang bersifat praktis dan akademis.

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan bagi masyarakat luas tentang peran KPU dalam memberikan literasi politik kepada pemilih pemula.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian serta mampu memberikan masukan atau sumbangan pemikiran terhadap peran Komisi Pemilihan Umum kota Bekasi dalam memberikan literasi politik kepada pemilih pemula.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan susunan penelitian ini, penulis menetapkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi pembahasan masalah yang diteliti, antara lain konsep dan teori penelitian serta kerangka pemikiran.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi penyajian data penelitian dan analisis data yang diperoleh dari KPU kota Bekasi dan Pemilih Pemula.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang relevan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini mencakup daftar referensi yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini.